

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SOPPENG 2021



<https://soppengkab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SOPPENG 2021



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2021

Nomor Publikasi: 73120.2124

Katalog: 4102004.7312

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxiv + 76 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

Tim Penyusun

Pembina:

Paulus Mangande, SE

Pengarah:

Anny Arjumiati Anis, SE, MM

Penulis:

S A Herdiana Putri, S.Stat

Penyunting:

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

Desain Cover:

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

Desain Layout

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

<https://soppengkab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2021 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng. Selain itu, publikasi ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain; Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Watansoppeng, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Soppeng



Paulus Mangande, SE
NIP. 196403171992021001

<https://soppengkab.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
Istilah Teknis.....	xvii
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Kependudukan.....	9
2.1. Piramida Penduduk.....	10
2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	11
2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	12
2.4. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	14
2.5. Status Perkawinan.....	15
Bab III Fertilitas dan Keluarga Berencana.....	21
Bab IV Pendidikan.....	27
4.1. Status Pendidikan.....	28
4.1.1. Indikator Daya Tampung Sekolah.....	29
4.1.2. Indikator Kecukupan Tenaga Pendidik.....	30
4.2. Partisipasi Sekolah.....	31
4.2.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	31
4.2.2. Angka Partisipasi Murni.....	33
4.3. Rata-Rata Lama Sekolah.....	35

4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	36
Bab V Kesehatan.....	39
5.1. Derajat Kesehatan Masyarakat.....	39
5.2. Status Kesehatan Masyarakat.....	42
5.3. Status Kesehatan Masyarakat.....	43
5.4. Tenaga Kesehatan.....	44
Bab VI Perumahan.....	47
6.1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	48
6.2. Kualitas Perumahan.....	49
6.2.1. Jenis Atap Terluas.....	49
6.2.2. Jenis Dinding Terluas.....	50
6.2.3. Jenis dan Luas Lantai.....	51
6.3. Fasilitas Perumahan.....	52
6.3.1. Sumber Air Minum.....	53
6.3.2. Fasilitas Penerangan.....	55
6.3.3. Fasilitas Buang Air Besar.....	56
Bab VII Lain-Lain.....	63
7.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk.....	63
7.2. Penduduk Miskin.....	65
Lampiran.....	71

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk (Jiwa) menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	11
Tabel 2. Jumlah Penduduk (jiwa) menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2020.....	13
Tabel 3. Luas Wilayah (Km ²), Jumlah Penduduk (Jiwa), dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²), menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng, 2020 ...	13
Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Soppeng 2019-2020.....	15
Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2020.....	16
Tabel 6. Persentase Wanita Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng, 2018-2020.....	22
Tabel 7. Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021	30
Tabel 8. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021	30
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2020	50
Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019 -2020 (Rupiah)	64

<https://soppengkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020	10
Gambar 2. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2020	17
Gambar 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Tiga Metode Kontrasepsi yang Paling Banyak Digunakan di Kabupaten Soppeng, 2020.....	23
Gambar 4. Jumlah Sarana Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng 2020	28
Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng, 2018-2020	32
Gambar 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2020.....	33
Gambar 7. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2020.....	34
Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng, 2018-2020	35
Gambar 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng, 2020	36
Gambar 10. Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Soppeng, 2018- 2020	40
Gambar 11. Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng, 2018-2020	41
Gambar 12. Angka Kesakitan (Morbidity Rate) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2020	42
Gambar 13. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2020.....	43
Gambar 14. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2020.....	44
Gambar 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun 2020	48
Gambar 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di ...	51

Gambar 17. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Soppeng, 2020.....	52
Gambar 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Kebersihan Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng, 2019-2020.....	53
Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di.....	54
Gambar 20. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Soppeng, 2020	56
Gambar 21. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020.....	57
Gambar 22. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020.....	58
Gambar 23. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020	59
Gambar 24. Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2020	64
Gambar 25. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2018-2020	66
Gambar 26. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2018-2020.....	66

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Soppeng, 2018-2020.....	71
Lampiran 2. Beberapa Indikator Fertilitas dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, 2018-2020	72
Lampiran 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng, 2018-2020	73
Lampiran 4. Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2018-2020	74
Lampiran 5. Beberapa Indikator Perumahan Kabupaten Soppeng, 2018-2020	75
Lampiran 6. Beberapa Indikator Lainnya Kabupaten Soppeng, 2018-2020....	76

<https://soppengkab.bps.go.id>

Istilah Teknis

Kependudukan

Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan atau penambahan penduduk dalam kurun waktu tertentu, dan interpretasinya bahwa semakin kecil angka ini maka semakin mencerminkan kesuksesan penanganan/pengendalian jumlah penduduk.

Kepadatan Penduduk

Angka yang menggambarkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Angka ini diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin padat penduduknya

Angka Beban Ketergantungan (ABK)

Perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas)

Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100. Interpretasinya : bahwa apabila angka ini menunjukkan angka lebih dari 100, maka penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan

Status Perkawinan

Kawin adalah berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Perempuan yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Fertilitas Dan Keluarga Berencana (KB)

Paritas/Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa produksinya. Paritas merupakan ukuran fertilitas dari satu kohor yang mengukur fertilitas yang telah dicapai oleh perempuan dari kelompok umur yang berbeda-beda, mulai masuk usia reproduksi hingga waktu pencacahan

Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Rata-rata anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan, baik secara modern maupun secara tradisional.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Pendidikan

Rasio Murid-Sekolah (RMS)

Angka yang mencerminkan daya tampung per sekolah atau menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan

Rasio Murid-Guru (RMG)

Angka yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar atau dengan kata lain memperlihatkan mutu pengajaran/pengawasan dan perhatian guru di kelas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Perbandingan antara penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umurnya dengan jumlah penduduk pada umur tingkat pendidikan masing-masing. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan banyaknya penduduk yang menerima pendidikan pada suatu tingkat tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok umurnya (tepat waktu) terhadap jumlah penduduk kelompok umur pendidikan tersebut

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Proporsi murid yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur pendidikan tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan banyaknya penduduk yang menerima pendidikan pada suatu tingkat tertentu

Angka Putus Sekolah (APTS)

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu tingkat pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan seseorang untuk dapat membaca dan menulis. Angka ini dapat memberikan informasi tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa/daerah, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Kesehatan

Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang masih hidup saat lahir. Angka ini mencerminkan status kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi Umur Harapan Hidup Saat Lahir maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang Kesehatan

Angka Kesakitan/*Morbidity Rate* (MR)

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Keluhan Kesehatan

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau lain hal

Sakit/terganggu kesehatan

Sakit/terganggu kesehatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena sakit tersebut.

Imunisasi

Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang.

Perumahan

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap

enutup bagian atas bangunan yang melindungi orang dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas bangunan tersebut.

Air dalam Kemasan

Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 1,5 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas/plastik, antara lain air kemasan merk Aqua, Airqita, Ades dan Vit.

Air Leding

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Air pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Air Sumur/Parigi

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.

Mata Air

Sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya.

Leher Angsa

Kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan

Jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata-rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cubluk/Cemplung

Jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran atau langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.

Tangki

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik mempunyai bak resapan maupun tidak.

Lobang Tanah

Tempat pembuangan akhir yang berupa lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Lain-Lain

Kemiskinan

Keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak atau tidak dapat terpenuhinya kebutuhan minimum untuk pangan, perumahan, kesehatan dan Pendidikan

Penduduk Miskin

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan atau penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan

Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan

Pengeluaran per Kapita per Bulan

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

<https://soppengkab.bps.go.id>



BAB 1

PENDAHULUAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang sering disebut dengan kesejahteraan, melalui usaha-usaha di berbagai bidang salah satunya dalam bidang sosial. Kesejahteraan yang dimaksud tidak saja menyangkut kemampuan pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat nonmateriil. Kebutuhan materiil diantaranya adalah sandang, pangan, dan perumahan, sedangkan kebutuhan nonmateriil diantaranya pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Ukuran kesejahteraan hingga saat ini masih sulit untuk diketahui dan menjadi perdebatan karena kesejahteraan menyangkut segala sendi kehidupan manusia.

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, dan pengukuran keberhasilan suatu tahap pembangunan diperlukan indikator sosial yang sering disebut sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Indikator ini merupakan pelengkap dari indikator ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.

1.2. Ruang Lingkup

Kesejahteraan mencakup kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan berbagai unsur kualitas kehidupan. Dalam pengertian yang luas, sangat tidak mungkin menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini merupakan indikator yang dapat diukur (*measurable welfare*). Oleh karena itu, statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng 2021 dimana data-data pada publikasi ini juga akan dibandingkan dengan

data-data pada tahun-tahun sebelumnya sehingga pada periode tersebut dapat diketahui perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Soppeng.

1.3. Sumber Data

Badan Pusat Statistik melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk mendapatkan informasi mengenai kesejahteraan penduduk yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat antara lain melalui data kependudukan, fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lain-lain. Selain itu, dikumpulkan juga data pendukung dari dinas/instansi terkait yang diambil dari publikasi Kabupaten Soppeng dalam Angka.

Ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dan ekonomi dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih atau telah menikmati listrik, rata-rata pengeluaran sebulan dan lain sebagainya.

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun dalam delapan bab yang dilengkapi dengan tabel dan grafik dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, ruang lingkup, sumber data dan sistematika penulisan.

BAB II KEPENDUDUKAN

Memuat piramida penduduk, jumlah dan pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, kelompok umur dan jenis kelamin, serta status perkawinan.

BAB III FERTILITAS DAN KB

Memuat pemakaian alat/cara KB.

BAB IV PENDIDIKAN

Memuat sarana pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Angka Melek Huruf (AMH).

BAB V KESEHATAN

Memuat derajat kesehatan masyarakat, status kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

BAB VI PERUMAHAN

Memuat status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas penerangan, dan fasilitas buang air besar.

BAB VII LAIN-LAIN

Memuat pengeluaran per kapita sebulan dan pola konsumsi penduduk, serta penduduk miskin.

<https://soppengkab.bps.go.id>



BAB 2

KEPENDUDUKAN

<http://sopnengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab II

Kependudukan

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk dipandang sebagai salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya merupakan sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya, tidak hanya yang bersifat mengendalikannya saja.

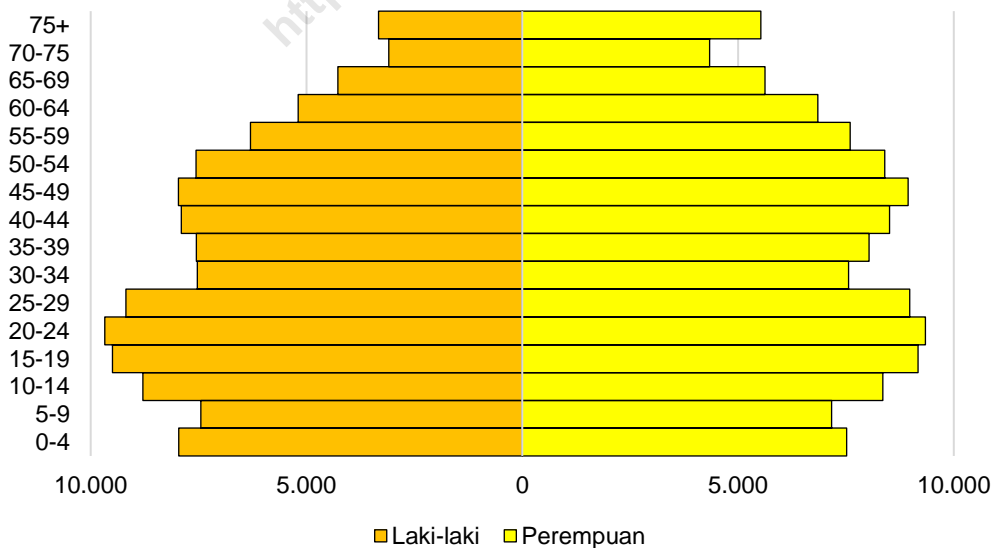
Sejalan dengan itu, diperlukan data-data kependudukan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung setiap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk. Hal tersebut sangat penting mengingat jumlah penduduk yang besar dan selalu bertambah diharapkan tidak hanya menjadi beban dalam pembangunan, tetapi juga menjadi potensi dalam mendukung pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sangat membutuhkan data kependudukan dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Di sisi lain, para pelaku bisnis juga memerlukan data kependudukan untuk keperluan perencanaan produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/karyawan. Begitu juga dengan lembaga swasta nonprofit dan lembaga-lembaga lainnya, data sangat dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk memecahkan suatu masalah-masalah tertentu.

2.1. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah ilustrasi grafis yang menggambarkan distribusi dari berbagai kelompok umur dalam populasi manusia di suatu wilayah. Piramida penduduk digambarkan dalam dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam interval kelompok umur penduduk lima tahunan.

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan umur dan distribusi jenis kelamin penduduk. Berdasarkan gambar piramida penduduk tersebut, secara sekilas dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Piramida penduduk Kabupaten Soppeng dapat digambarkan melalui Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Gambar 1, bentuk piramida penduduk Kabupaten Soppeng adalah piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar yang berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Daerah dengan piramida ekspansif memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat.

2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 235.167 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 113.243 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 121.924 jiwa. Apabila diproporsikan, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, atau 51,84 persen dibanding 48,15 persen.

Salah satu indikator kependudukan yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk (Jiwa) menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	106.484	119.821	226.305	88,87	-
2017	106.591	119.875	226.466	88,92	0,07
2018	106.788	119.982	226.770	89,00	0,13
2019	106.927	120.064	226.991	89,06	0,10
2020	113.243	121.924	235.167	92,88	3,60

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2016-2019, Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 1, rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 adalah 92,88. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari 100 orang penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat sekitar 92 atau 93 orang penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020, rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Soppeng selalu di atas angka 88 dari tahun ke tahun.

Penduduk Kabupaten Soppeng setiap tahun selalu bertambah jumlahnya. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam empat tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Soppeng selalu positif. Hal ini sejalan dengan bentuk piramida penduduk Kabupaten Soppeng pada Gambar 1 yang bertipe ekspansif. Tentunya pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran, tetapi juga dipengaruhi adanya angka kematian dan perpindahan atau migrasi penduduk dari dan keluar Kabupaten Soppeng.

2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar di delapan kecamatan. Pada tahun 2020, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Lalabata, yaitu sebanyak 48.663 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Citta, yaitu sebanyak 8.046 jiwa. Berdasarkan Tabel 2, secara umum rasio jenis kelamin untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Soppeng berada di bawah 100 yang artinya setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Adapun kecamatan dengan rasio jenis kelamin terbesar adalah Kecamatan Lalabata, yaitu sebesar 95,73 sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Ganra, yaitu sebesar 89,90. Hal ini berarti bahwa terdapat 95-96 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Lalabata dan terdapat 89-90 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Citta.

Tabel 2. Jumlah Penduduk (jiwa) menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Marioriwawo	23.290	24.910	48.200	93,50
Lalabata	23.801	24.862	48.663	95,73
Liliriaja	13.443	14.664	28.107	91,67
Ganra	5.419	6.028	11.447	89,90
Citta	3.846	4.200	8.046	91,57
Lilirilau	17.957	19.845	37.802	90,49
Donri-Donri	11.386	12.501	23.887	91,08
Marioriawa	14.101	14.914	29.015	94,55
Soppeng	113.243	121.924	235.167	92,88

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Soppeng mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 mencapai 156,78 jiwa perkilometer persegi. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Liliriaja dengan kepadatan penduduk mencapai 292,78 jiwa perkilometer persegi, sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan sekitar 90,67 jiwa perkilometer persegi.

Tabel 3. Luas Wilayah (Km²), Jumlah Penduduk (Jiwa), dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²), menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng, 2020

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Marioriwawo	300	48.200	160,67
Lalabata	278	48.663	175,05
Liliriaja	96	28.107	292,78
Ganra	57	11.447	200,82
Citta	40	8.046	201,15
Lilirilau	187	37.802	202,15
Donri-Donri	222	23.887	107,60

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Marioriwawa	320	29.015	90,67
Soppeng	1.500	235.167	156,78

Sumber: Sensus Penduduk 2020

2.4. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat juga dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya tingkat kelahiran dan dapat mencerminkan Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *dependency ratio*. Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 4 berikut, pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berusia muda (0-14 tahun) mencapai 47.238 orang. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 52.878 jiwa. Penurunan ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan angka kelahiran selama tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Soppeng tercatat mencapai 161.744 jiwa pada tahun 2020 dimana angka tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2019 yang

hanya berjumlah 150.072 jiwa. Penduduk usia tua (65 tahun ke atas) pada tahun 2020 juga tercatat mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 26.185 orang.

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Soppeng 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	226.991	235.167
0-14 tahun	52.878	47.238
15-64 tahun	150.072	161.744
65+ tahun	24.041	26.185
Persentase lansia (65+)	10,59	11,13
Angka Beban Ketergantungan	51,25	45,39

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2019, Sensus Penduduk 2020

Beberapa ahli demografi menyatakan bahwa suatu wilayah yang angka beban ketergantungannya dibawah 50 maka wilayah tersebut masuk pada fase bonus demografi. Bonus Demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan dikarenakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Soppeng telah sampai pada fase bonus demografi tersebut.

2.5. Status Perkawinan

Salah satu karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi yaitu status perkawinan. Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk yang berstatus kawin yaitu penduduk yang berada dalam ikatan perkawinan baik secara hukum adat, agama, negara

dan sebagainya, maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

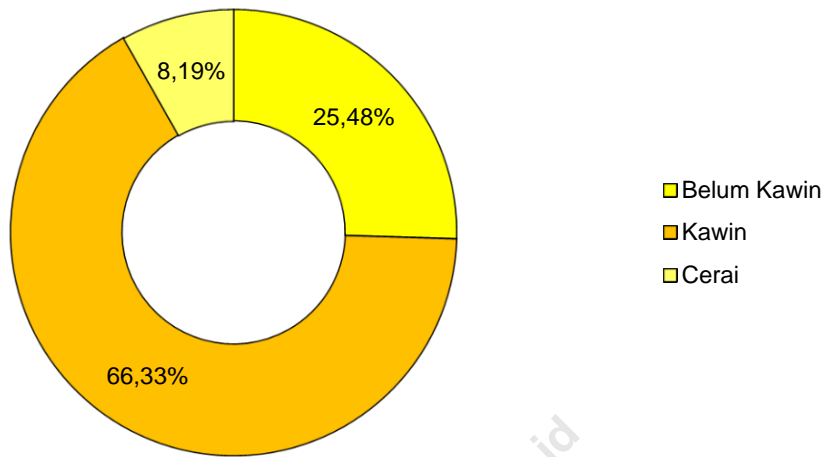
Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2020

Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Soppeng
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	34,48	25,15	29,48
Kawin	58,76	55,32	56,92
Cerai	6,76	19,53	13,60
Soppeng	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2020 sebagian besar berstatus kawin, yakni sebesar 56,92 persen, sedangkan yang berstatus belum kawin ada sebanyak 29,48 persen dan 13,60 persen sisanya berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati). Sementara itu apabila dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 58,76 persen penduduk laki-laki umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng sudah berstatus kawin, lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 10 tahun ke atas yang sudah kawin sebesar 55,32 persen. Namun apabila dilihat pada status perkawinan cerai, dapat diketahui sebuah fenomena bahwa lebih banyak penduduk umur 10 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan yang berstatus cerai dibandingkan penduduk umur 10 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki yang berstatus cerai. Perbandingannya mencapai 19,53 persen dibanding 6,76 persen.

Apabila karakteristik status perkawinan penduduk perempuan dilihat pada kelompok umur 15-49 tahun, dapat diketahui bahwa persentase status perkawinan kawin lebih tinggi dibandingkan dengan status perkawinan tidak kawin (belum kawin dan cerai).



Gambar 2. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 66,33 persen perempuan yang berstatus kawin dari total perempuan umur 15-49 tahun di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 10 tahun ke atas, persentase yang berstatus kawin tersebut lebih besar. Hal ini dikarenakan pada penduduk berjenis kelamin perempuan, secara spesifik umur 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan yang merupakan usia produktif untuk menghasilkan keturunan. Sementara apabila dilihat pada umur 10 tahun ke atas, umur 10-14 tahun dan umur 50 tahun ke atas bukan lagi merupakan usia subur bagi perempuan untuk menghasilkan keturunan.

<https://soppengkab.bps.go.id>



BAB 3

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

<https://sop.pengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab III

Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Fertilitas dapat dipengaruhi oleh keadaan dari perempuan itu sendiri yakni secara kodrati perempuanlah yang mengalami reproduksi. Keadaan perempuan tersebut diantaranya ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang perempuan sehingga kemungkinan seorang perempuan dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fertilitas. Kebijakan tersebut diantaranya dengan pemberian batasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB).

Pemberian batasan usia pernikahan dimaksudkan agar wanita menunda usia perkawinan mereka sehingga dapat memperpendek masa reproduksinya. Perempuan yang kawin pada usia yang terlalu muda cenderung berisiko lebih tinggi selama masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan perempuan yang sudah berada pada usia matang (lebih dari 20 tahun). Risiko selama kehamilan dan persalinan akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dengan menunda usia kawin diharapkan wanita dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi atau pun bekerja sehingga memiliki bekal yang cukup, baik material maupun spiritual untuk berumah tangga kelak.

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan yaitu dapat berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program

Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh salah satunya dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Berdasarkan Tabel 6 berikut, dapat diketahui bahwa persentase wanita pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah atau sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2020 mencapai 64,83 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, persentasenya cenderung mengalami pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran serta partisipasi wanita pernah kawin umur 15-49 tahun dalam mensukseskan progam KB cenderung mengalami mengalami pertumbuhan.

Tabel 6. Persentase Wanita Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Partisipasi KB di Kabupaten Soppeng, 2018-2020

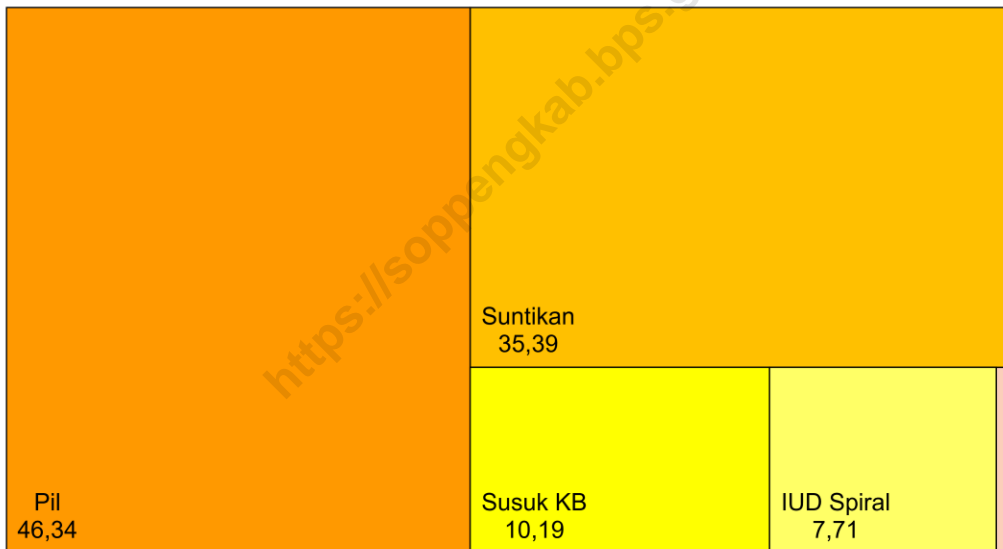
Partisipasi KB	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah Menggunakan	21,12	19,81	22,84
Sedang Menggunakan	40,45	40,56	41,99
Tidak Pernah Menggunakan	38,43	39,63	35,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Apabila ditinjau dari penggunaan alat kontrasepsi, secara umum perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 lebih cenderung menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil, persentasenya mencapai 81,73 persen. Sementara sisanya sebesar 18,23 persen memilih menggunakan metode jangka panjang seperti implan, IUD, dan MOW/MOP.

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB perempuan pernah kawin berumur 15-49

tahun di Kabupaten Soppeng adalah Pil KB yang persentasenya mencapai 46,34 persen. Alat kontrasepsi berikutnya yang paling banyak digunakan adalah suntikan, persentasenya sebesar 35,39 persen. Kedua metode ini memiliki persentase yang paling besar dibandingkan metode lainnya karena metode ini relatif jauh lebih mudah dari segi cara pemakaiannya, termasuk apabila akseptor ingin berhenti menggunakannya maka pemberhentian tersebut dapat dilakukan kapanpun sesuai yang dikehendaki oleh akseptor. Terlebih lagi kedua metode tersebut juga relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Selain itu, risiko terjadinya kelainan relatif juga lebih kecil dibanding metode kontrasepsi lainnya.



Gambar 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Tiga Metode Kontrasepsi yang Paling Banyak Digunakan di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



BAB 4

PENDIDIKAN

<https://sop.pengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab IV

Pendidikan

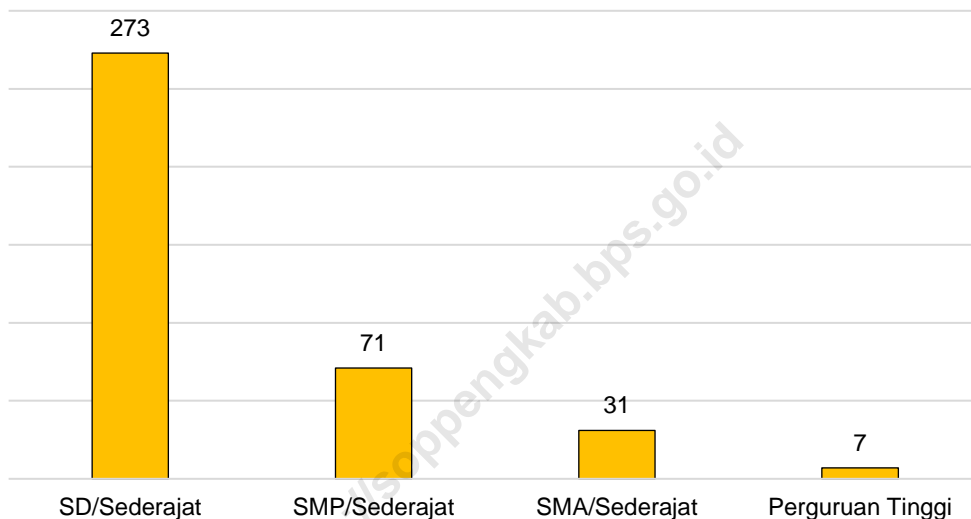
Kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pembangunan fisik tidak dapat meninggalkan pembangunan manusia sebagai mesin penggerakannya. Kualitas SDM yang tersedia menentukan tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dicanangkan bersama. Cara utama untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan berkualitas, berkesinambungan dan merata.

Pendidikan merupakan kebutuhan dan usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan harus menjadi stimulus bagi manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri yang pada akhirnya secara makro akan meningkatkan perekonomian maupun ketahanan nasional. Sedemikian penting pendidikan sehingga UUD 1945 mengamanatkan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Soppeng sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa hal antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya, penyediaan berbagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

4.1. Status Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Jumlah yang cukup dan akses yang mudah dicapai akan memberi dorongan bagi penduduk untuk menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat yang tertinggi.



Gambar 4. Jumlah Sarana Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng 2020

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2021

Pada tahun ajaran 2020/2021, di Kabupaten Soppeng terdapat 273 Sekolah Dasar yang terdiri atas 250 unit Sekolah Dasar Negeri, 3 unit Sekolah Dasar Swasta, 1 unit Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 19 Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Jumlah Sekolah Menengah Pertama mencapai 71 sekolah terdiri dari 31 unit Sekolah Menengah Pertama Negeri, 7 unit Sekolah Menengah Pertama Swasta, 1 unit Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 32 unit Madrasah Tsanawiyah Swasta. Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Atas ada sebanyak 31 sekolah yang terdiri dari 8 Sekolah Menengah Atas Negeri, 4 Sekolah Menengah Atas Swasta, 5 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, 5 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 7 Madrasah

Aliyah Swasta. Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Soppeng berjumlah tujuh perguruan tinggi yang terdiri dari 6 Perguruan Tinggi Swasta dan 1 Perguruan Tinggi Agama.

4.1.1. Indikator Daya Tampung Sekolah

Rasio Murid Sekolah pada setiap tingkat pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio Murid Sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap tingkat pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat perlu atau tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap tingkat pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai.

Rasio Murid Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat mengalami penurunan. Jika pada tahun ajaran 2019/2020 nilai Rasio Murid Sekolah untuk tingkat SD/ sederajat adalah 78,33; maka pada tahun 2020/2021 turun menjadi 77,14. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, Rasio Murid Sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2020/2021, Rasio Murid Sekolah untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 150,96 naik menjadi 151,56 untuk tahun ajaran 2020/2021. Begitu halnya pada jenjang SMA/ sederajat terjadi peningkatan Rasio Murid Sekolah. Rasio Murid Sekolah pada jenjang SMA/ sederajat tahun ajaran 2019/2020 sebesar 267,73 naik menjadi 323,58 untuk tahun ajaran 2020/2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah murid dibarengi dengan pengurangan jumlah sekolah pada jenjang tersebut.

Tabel 7. Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021		
	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ Sederajat	21.384	273	78,33	21.058	273	77,14
SMP/ Sederajat	10.718	71	150,96	10.761	71	151,56
SMA/ Sederajat	9.906	37	267,73	10.031	31	323,58

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020-2021

4.1.2. Indikator Kecukupan Tenaga Pendidik

Selain dari sarana yang memadai, hasil kualitas pendidikan juga ditentukan oleh proses yang dijalani. Proses pendidikan akan berjalan baik apabila interaksi antara murid dan guru berjalan lancar. Apabila jumlah murid yang dibimbing oleh seorang guru terlalu banyak, maka interaksi dan komunikasi yang terjalin akan kurang maksimal. Rasio Murid-Guru merupakan indikator yang dapat menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

Tabel 8. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ Sederajat	21.384	2.952	7,24	21.058	2.851	7,39
SMP/ Sederajat	10.718	1.513	7,08	10.761	1.278	8,42

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SMA/ Sederajat	9.906	1.141	8,68	10.031	1.177	8,52

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020-2021

Rasio Murid Guru pada tingkat pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2020/2021 adalah 7,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 7 sampai dengan 8 murid pada tingkat SD/ Sederajat untuk tahun ajaran 2020/2021. Pada tahun ajaran yang sama, untuk tingkat SMP/ sederajat serta SMA/ sederajat, setiap guru mengajar sekitar 8 sampai 9 murid.

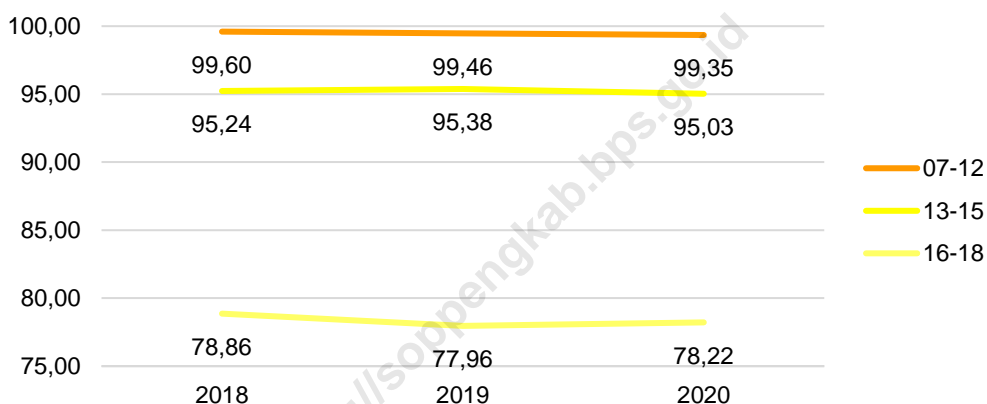
4.2. Partisipasi Sekolah

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar UUD. Dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, disertai kesadaran akan pentingnya pendidikan, pemerintah pusat dan daerah senantiasa berupaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia. Berbagai program dicanangkan antara lain Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa Bidik Misi. Untuk mengetahui keberhasilan program-program tersebut, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah.

4.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui

banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi Angka Partisipasi Sekolah berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Akan tetapi, kelemahan Angka Partisipasi Sekolah adalah tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/nikmati pendidikan.



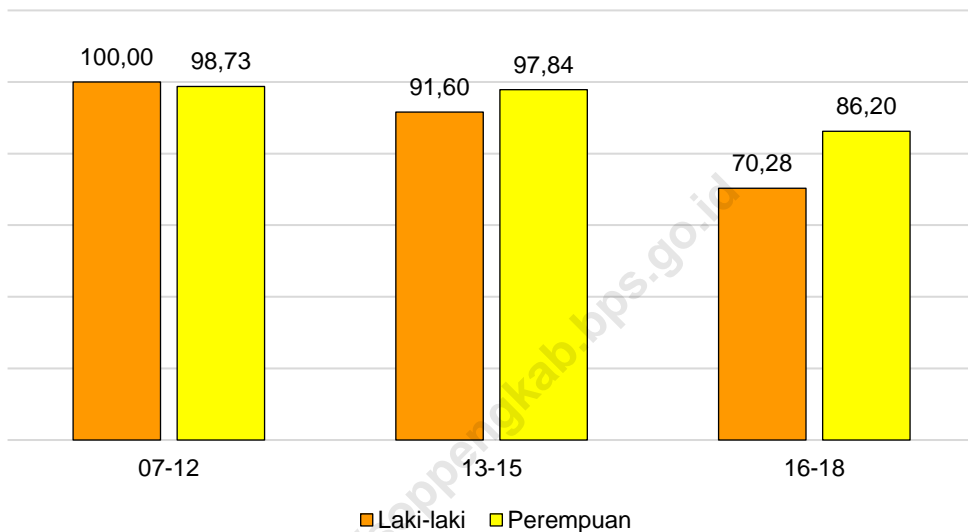
Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Dalam kurun waktu 2018-2020, pada kelompok umur 07-12 tahun terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Sekolah umur 07-12 tahun adalah 99,60 persen, turun menjadi 99,46 persen di tahun 2019 dan mencapai 99,35 persen pada tahun 2020. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok umur 13-15 dan 16- 18 tahun. Pada kelompok umur 13-15 tahun, meskipun pada 2018 ke 2019 terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dari 95,24 persen menjadi 95,38 persen, tetapi pada tahun 2020 angkanya turun menjadi 95,03 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 16-18 tahun, terjadi penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 78,86 persen menjadi 77,96 persen, tetapi pada tahun 2020

terjadi kenaikan sehingga Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur tersebut menjadi 78,22 persen. Selain itu, apabila diperhatikan semakin tua kelompok umur maka Angka Partisipasi Sekolahnya semakin menurun.

Angka Partisipasi Sekolah dapat dibedakan juga menurut jenis kelamin.



Gambar 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2020

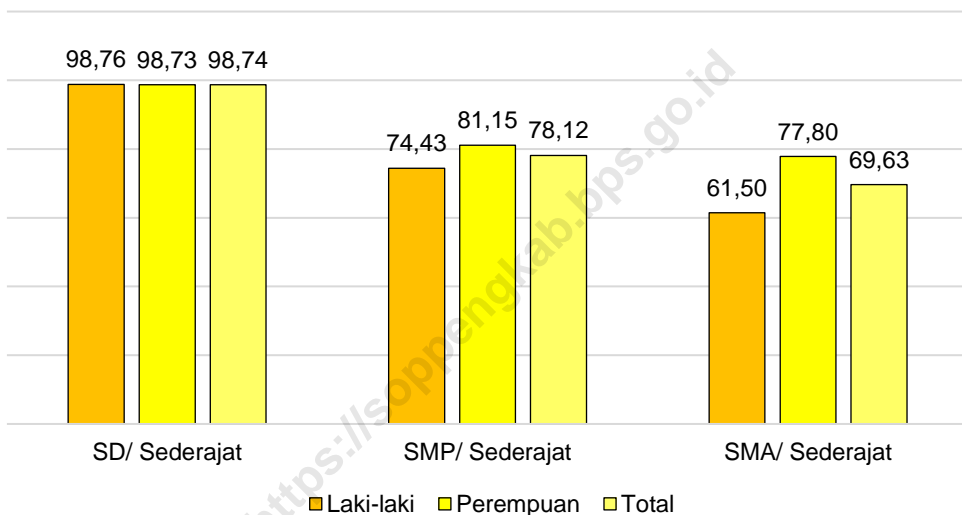
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Gambar 6, Angka Partisipasi Sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah laki-laki untuk kelompok umur 7-12 tahun. Sementara itu pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah Laki-Laki lebih rendah dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah perempuan.

4.2.2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka Partisipasi

Murni juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis jenjang pendidikan yaitu jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, Angka Partisipasi Murni juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.



Gambar 7. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng, 2020

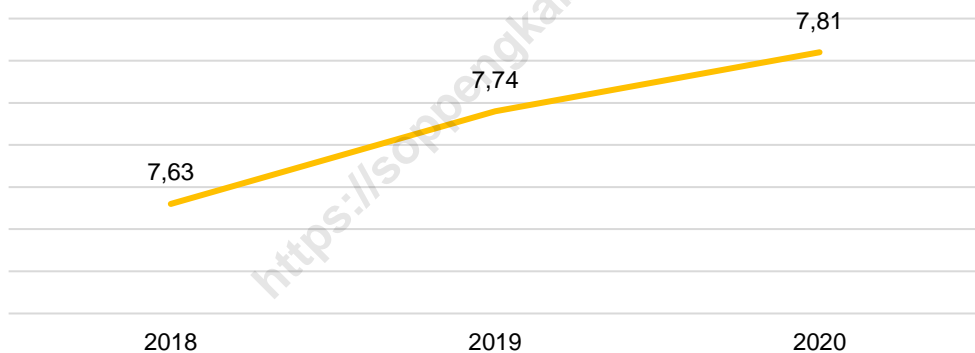
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan apabila dilihat dari karakteristik jenis kelamin. Angka Partisipasi Murni untuk SD/Sederajat secara keseluruhan mencapai angka 98,74 persen yang artinya sebanyak 98,74 persen anak sekolah SD/Sederajat menunjukkan kesesuaian dengan penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di bangku SD/Sederajat. Begitu juga dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Pada jenjang tersebut diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni penduduk laki-laki lebih rendah

daripada penduduk perempuan. Selain itu apabila dibandingkan antar jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah Angka Partisipasi Murni penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

4.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dari segi pencapaian pendidikan selain Angka Melek Huruf. Rata-Rata Lama Sekolah dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa. Semakin lama Rata-Rata Lama Sekolah penduduk, maka semakin baik tingkat pendidikan penduduk tersebut.



Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng, 2018-2020

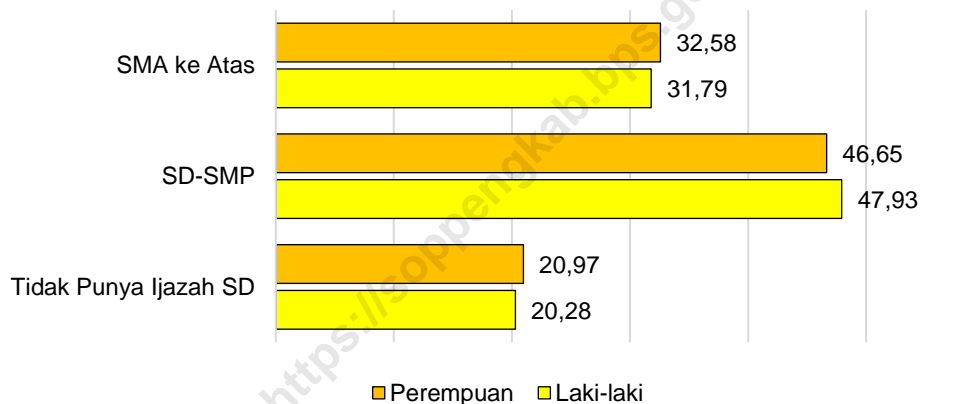
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 7,81 tahun. Angka tersebut memiliki arti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Soppeng hanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah selama 7 sampai 8 tahun, atau apabila dikonversikan ke pendidikan formal, rata-rata kurang lebih tamat SD/ sederajat sampai tahun kedua bangku SMP/ sederajat sehingga Gambar 8 mengandung pengertian bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 rata-rata penduduk di

Kabupaten Soppeng mengenyam pendidikan hanya sampai tahun pertama hingga tahun kedua sekolah menengah pertama.

4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan



Gambar 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Gambar 9, diketahui bahwa pada tahun 2020, Sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng berpendidikan terakhir paling tinggi adalah SD/Sederajat dan/atau SMP/Sederajat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD atau tidak dapat menamatkan pendidikan di tingkat dasar masih di atas 20 persen.



BAB 5

KESEHATAN

<http://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab V

Kesehatan

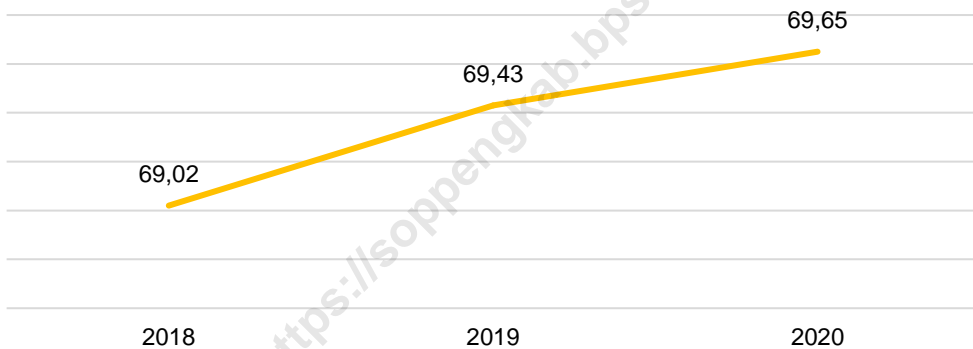
Kondisi kesehatan memberikan pengaruh yang besar bagi kualitas Sumber Daya Manusia pada umumnya. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatannya sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

Tingkat kesehatan penduduk berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya sehingga pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesejahteraan. Pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat serta penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin desa (polindes) dan masih banyak lagi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan bidang yang lain.

5.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor

keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Umur Harapan Hidup Saat Lahir disebut juga lama hidup seseorang/ sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, Umur Harapan Hidup Saat Lahir merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup Saat Lahir yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

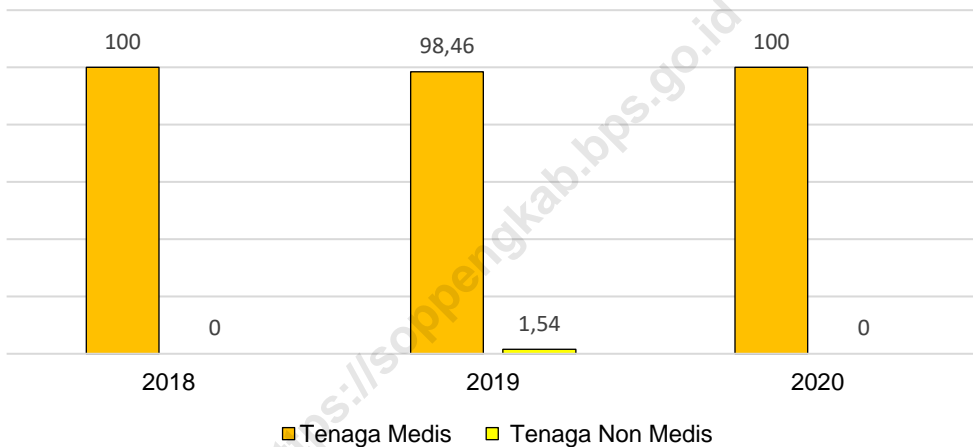


Gambar 10. Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Soppeng pada dalam rentang tahun 2018-2020 menunjukkan tren naik. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup Saat Lahir menunjukkan nilai 69,02 meningkat menjadi 69,43 pada tahun 2019, dan meningkat Kembali menjadi 69,65 pada tahun 2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata lama hidup penduduk Kabupaten Soppeng sampai meninggal yaitu kurang lebih pada usia 69 tahun. Naiknya angka Umur Harapan Hidup Saat Lahir dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Umur Harapan Hidup Saat Lahir pada saat seseorang lahir diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Umur Harapan Hidup saat lahir dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Semakin rendah tingkat kematian bayi, maka semakin tinggi Umur Harapan Hidup. Untuk menekan angka kematian bayi, diperlukan penolong persalinan yang memadai untuk menjamin proses persalinan yang aman dan benar.



Gambar 11. Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan Pertama di Kabupaten Soppeng, 2018-2020

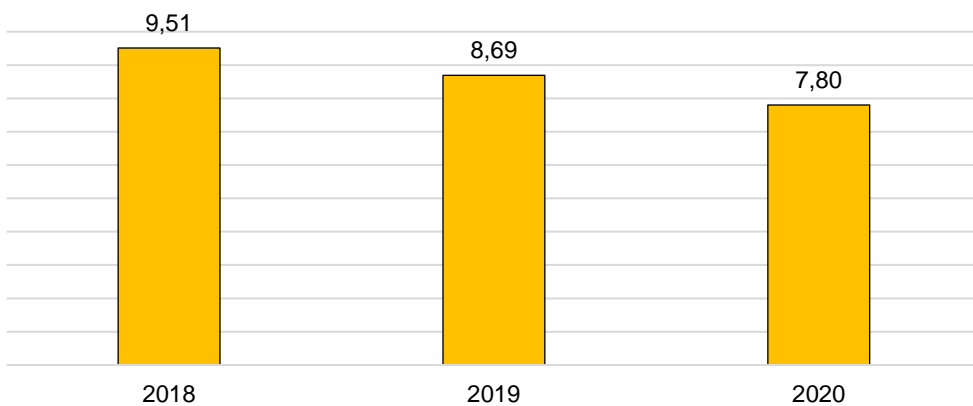
Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka 2021

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng tahun 2020, sudah 100 persen persalinan di Kabupaten Soppeng ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga paramedis lain). Proporsi tersebut naik dari tahun 2019 dimana tahun 2019 persentasenya mencapai 98,46 persen. Hal tersebut menjadi suatu pengingat kembali kepada pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mempertahankan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak dengan cara mensosialisasikan fasilitas persalinan medis secara lebih terbuka dan lebih luas dari berbagai segi, termasuk dengan mengadakan penyuluhan, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan

bantuan tenaga medis untuk menolong persalinan mereka. Dengan pertolongan persalinan menggunakan tenaga medis diharapkan dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi selama proses persalinan.

5.2. Status Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan masyarakat pada umumnya. Status kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventif. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan sehingga menyebabkan perubahan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk mengukur status kesehatan masyarakat digunakan indikator Angka Kesakitan/ Morbidity Rate. Angka Kesakitan didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah maupun kegiatan sehari-hari terhadap keseluruhan penduduk yang ada di wilayah tersebut.



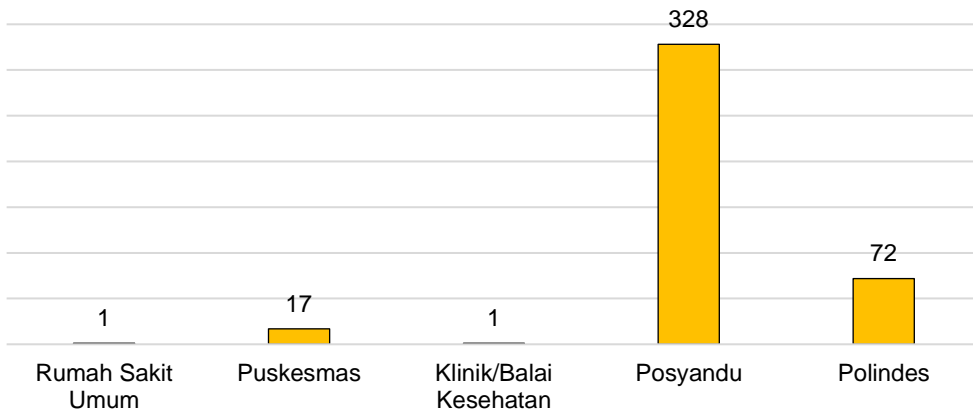
Gambar 12. Angka Kesakitan (Morbidity Rate) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Angka Kesakitan Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 7,80 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,69 persen yang juga mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 9,51 persen. Hal ini berarti bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Soppeng yang mengalami gangguan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dari tahun 2018 selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, atau dengan kata lain tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

5.3. Status Kesehatan Masyarakat

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai wilayah terpencil dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tidak mampu, tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Kantung-kantung layanan kesehatan di kecamatan dan desa terdiri dari puskesmas, pustu, dan poskesdes. Di Kabupaten Soppeng, terdapat sebanyak 1 unit Rumah Sakit Umum, 17 unit puskesmas, dan 328 unit posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan.

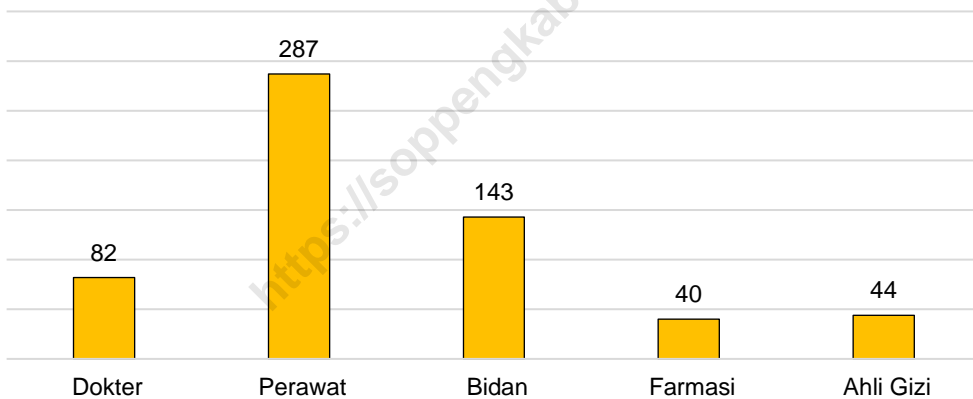


Gambar 13. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka 2021

5.4. Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia selain harus memiliki sarana dan perlengkapan yang memadai, perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan yang baik pula. Kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kualitas tenaga Kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.



Gambar 14. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2021

Pada tahun 2020, di Kabupaten Soppeng terdapat sebanyak 82 orang dokter yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain dokter, tenaga Kesehatan yang membantu memberikan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Soppeng antara lain 287 orang perawat, 143 orang bidan, 40 tenaga farmasi dan 44 ahli gizi. Dengan adanya para tenaga kesehatan tersebut, diharapkan status Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng akan terus mengalami peningkatan.



BAB 6

PERUMAHAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab VI

Perumahan

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan/rumah tempat tinggal. Perumahan sebagai sarana berlindung dan tempat tinggal bagi keluarga merupakan keperluan yang harus tersedia sekalipun tidak harus memilikinya. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah tempat tinggal juga dapat menunjukkan gaya hidup dan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya. Semakin tinggi status sosial maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas tempat tinggal atau perumahan ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari kondisi fasilitas yang ada di dalamnya, antara lain penguasaan tempat tinggal, lantai rumah (luas dan jenis), jenis dinding dan atap, fasilitas penerangan, sumber air minum, serta fasilitas buang air besar (jenis dan tempat penampungan tinja). Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

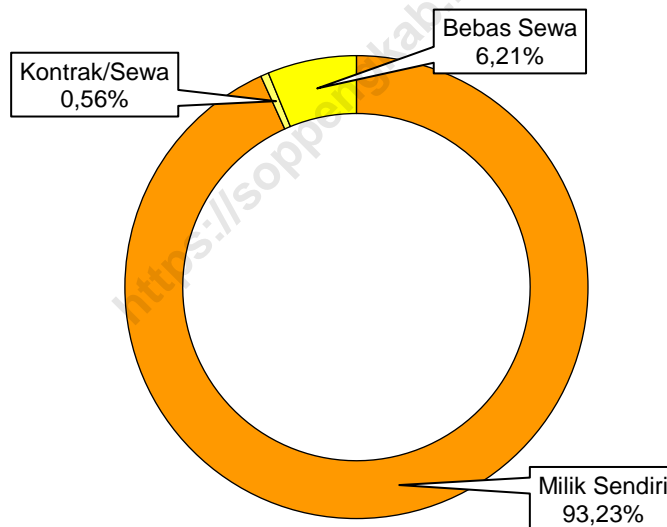
Kebijakan pemerintah di bidang perumahan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara mengadakan dan meningkatkan mutu fisik dan fasilitas lingkungan perumahan termasuk bentuk, ukuran/tipe rumah, dan bahan bangunan yang digunakan. Kebijakan ini berhadapan dengan faktor-faktor yang ada dalam masyarakat seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan biaya pembangunan perumahan yang semakin besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah yaitu menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Pemukiman merupakan bagian penting di dalam usaha pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan

produktivitas dengan penyediaan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat, air yang bersih dan lingkungan yang sehat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menggambarkan kualitas perumahan dan lingkungan tersebut, BPS menggunakan pendekatan rumah tangga yang menempati suatu bangunan.

6.1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka Panjang.



Gambar 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada tahun 2020, hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Soppeng telah memiliki rumah sendiri, persentasenya mencapai 93,23 persen. Sisanya, sebesar 6,77 persen menempati] bebas sewa, kontrak/sewa, dan lainnya.

6.2. Kualitas Perumahan

Kualitas rumah tinggal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Kualitas bahan bangunan yang digunakan dapat dilihat dari atap, dinding dan lantai yang digunakan. Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki atap terluas berupa beton atau genteng, dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu serta lantai terluas bukan berupatanah. Selain itu, menurut World Health Organization (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m², sedangkan menurut Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per kapita dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak dan ruang gerak lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu persyaratan rumah sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

6.2.1. Jenis Atap Terluas

Atap merupakan komponen yang secara langsung berfungsi menahan atau melindungi dari teriknya sinar matahari dan turunnya hujan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan sebaiknya yang kuat dan tahan lama. Selain dari segi daya tahannya, pemilihan jenis atap sebagai pelindung tempat tinggal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengaruh harga, seni dan budaya daerah. Dari jenis atap yang dimiliki oleh rumah tangga dapat diketahui tingkat kemakmuran rumah tangga yang menempatinnya.

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2020

Jenis Atap	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Atap Layak	100,00	99,72
Beton	1,02	0,72
Genteng	0,14	1,20
Asbes	1,10	1,75
Seng	96,84	95,00
Bambu/Kayu/Sirap	0,91	1,05
Atap Tidak Layak	0,00	0,27
Jerami/Ijuk/Daun/Rumba	0,00	0,27
Lainnya	0,00	0,00

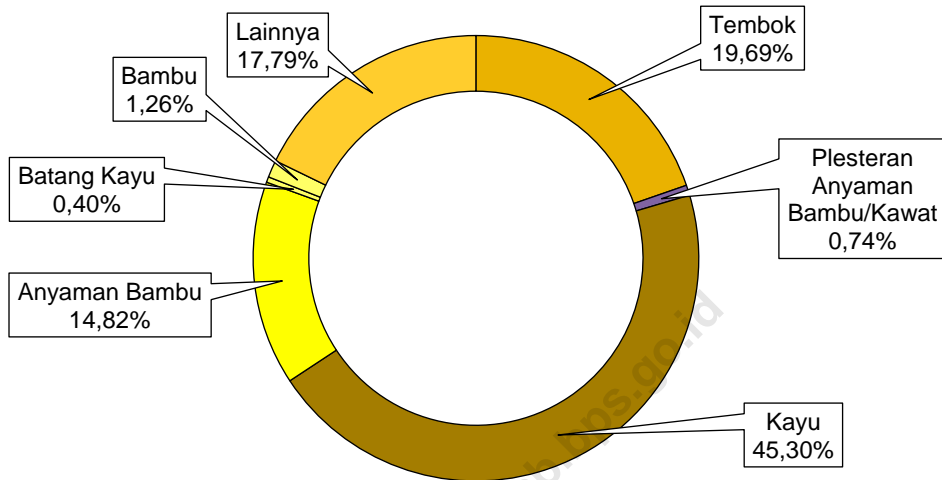
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada Tabel 9, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan atap rumah berjenis seng. Penggunaan atap berbentuk seng pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Jika pada tahun 2019 penggunaan atap seng mencapai 96,84 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 95,00 persen.

6.2.2. Jenis Dinding Terluas

Dinding rumah merupakan salah satu komponen penting dari bangunan tempat tinggal. Pemilihan jenis dinding oleh rupa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya daya tahan dan kemampuan ekonomi dari rumah tangga yang menempati. Selain berfungsi sebagai pembatas antar ruangan, dinding juga digunakan untuk melindungi diri dari pengaruh cuaca/iklim dan ancaman dari luar rumah. Oleh karena itu, jenis dinding yang digunakan seharusnya terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang serta dapat menahan panas dan dingin, sehingga bisa dikatakan kondisinya dapat memenuhi syarat kesehatan. Kualitas

dinding suatu rumah akan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang menempatinnya.



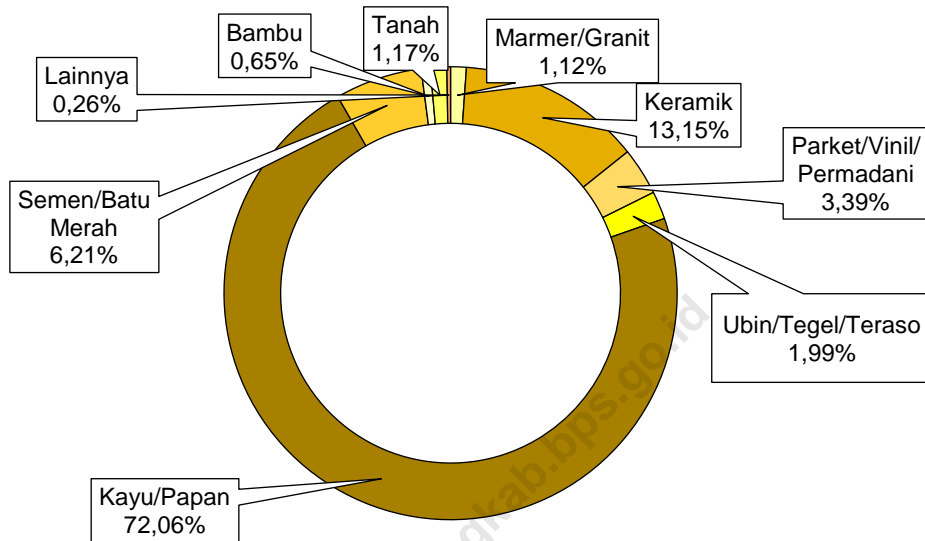
Gambar 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Rumah yang banyak dijumpai di Kabupaten Soppeng umumnya menggunakan dinding jenis kayu, persentase sebesar 45,30 persen pada tahun 2020. Penggunaan kayu yang lebih banyak persentasenya dibandingkan tembok sebagai dinding bagi rumah di Kabupaten Soppeng disebabkan karena bentuk rumah di Kabupaten Soppeng masih didominasi oleh bentuk rumah panggung.

6.2.3. Jenis dan Luas Lantai

Persyaratan rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan dari segi lantai yaitu lantai rumah harus kering/tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso atau

semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau jenis lainnya seperti bambu dan lain-lain (untuk rumah panggung).



Gambar 17. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada tahun 2020, jenis lantai rumah terluas di Kabupaten Soppeng terdiri dari kayu/papan dengan persentase 72,06 persen, diikuti oleh keramik sebesar 13,15 persen, semen/bata 6,21 persen dan sisanya jenis lantai lain berupa ubin/tegel/teraso, marmar/granit, parket/vinil/permadani, tanah serta jenis lantai rumah lainnya. Penggunaan kayu yang menjadi mayoritas lantai rumah di Kabupaten Soppeng disebabkan karena bentuk rumah di Kabupaten Soppeng sebagian besar berupa rumah panggung.

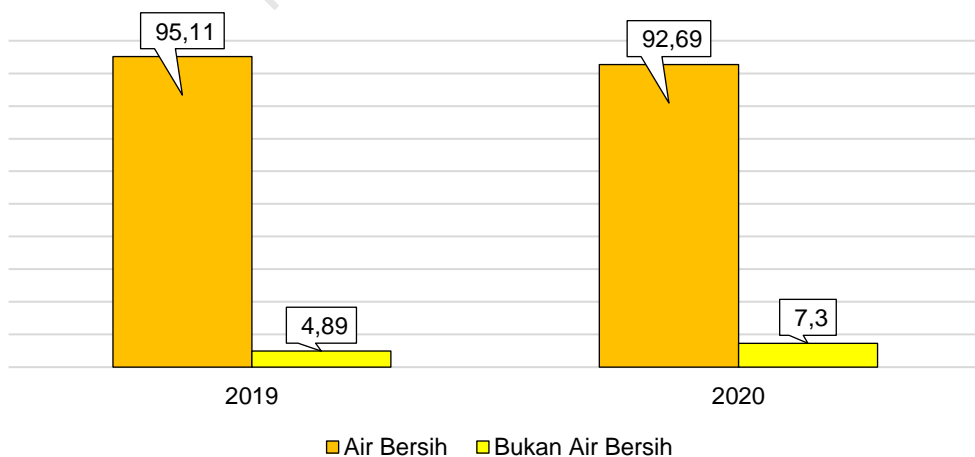
6.3. Fasilitas Perumahan

Indikator ini menunjukkan kelengkapan, kelayakan, dan fasilitas perumahan. Semakin lengkap fasilitas suatu rumah, maka anggota rumah

tangga yang menempati rumah tersebut akan semakin nyaman. Fasilitas perumahan ditinjau dari beberapa segi, diantaranya adalah sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas buang air besar baik dari segi penggunaan, jenis maupun tempat penampungan tinja.

6.3.1. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme dalam tubuh manusia, selain itu air juga dibutuhkan untuk membersihkan, mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan rumah tangga adalah keberadaan sumber air minum yang digunakan. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Penggunaan air bersih dapat diperoleh dari berbagai sumber air seperti air minum kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum.

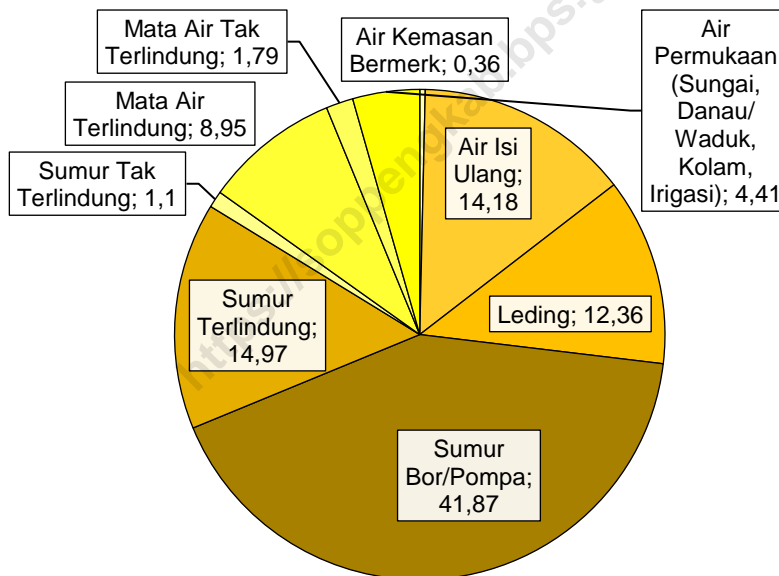


Gambar 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Kebersihan Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng, 2019-2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2020

Pada tahun 2020, ada sebanyak 92,69 persen rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan minumannya. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 95,11 persen.

Apabila dirinci menurut jenis sumber air minumannya, pada tahun 2020 sumber air minum utama yang menggunakan air bersih merupakan air dengan jenis sumur bor/pompa. Sebanyak 41,87 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan sumur bor/pompa. Urutan selanjutnya dari persentase tinggi ke rendah berturut-turut yaitu air sumur terlindung, air isi ulang, leding, mata air terlindung.



Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Soppeng
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

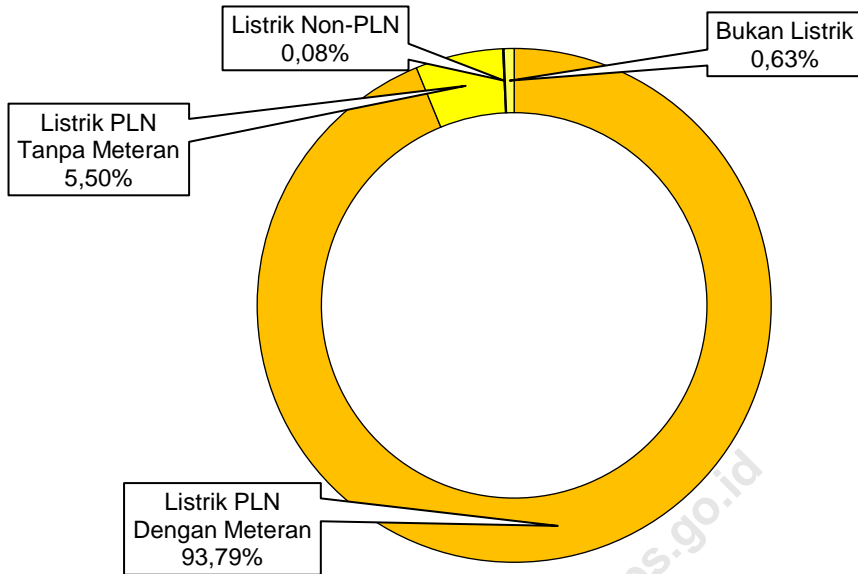
Berdasarkan Gambar 19, apabila dirinci menurut jenis sumber air minumannya, pada tahun 2020 sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Soppeng adalah jenis sumur bor/pompa, yaitu

sebesar 41,87 persen. Sumber air minum lain yang persentasenya diatas sepuluh persen adalah Air Isi Ulang, Leding dan Sumur Terlindung.

6.3.2. Fasilitas Penerangan

Fasilitas perumahan lain yang tidak kalah penting yaitu fasilitas penerangan. Dari berbagai macam sumber penerangan seperti listrik, petromak/aladin, pelita/sentir/obor dan lain-lain, sumber penerangan yang paling ideal adalah sumber penerangan yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Selain itu, sumber penerangan yang berasal dari listrik lebih praktis, modern, dan tidak menimbulkan polusi sehingga menjadikan listrik sebagai sumber penerangan yang memiliki nilai lebih tinggi dari sumber yang lain. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Ketersediaan listrik di suatu daerah selain dimanfaatkan sebagai sumber penerangan juga digunakan sebagai fasilitas penunjang untuk akses informasi khususnya media elektronik seperti radio, televisi, internet, dan sebagainya. Dengan adanya informasi yang didapat, secara tidak langsung juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari rumah tangga tersebut sehingga tingkat kemajuan suatu masyarakat juga dapat dilihat dari ketersediaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini. Mengingat jangkauan listrik yang sangat terbatas, maka tidak semua rumah tangga bisa memperoleh fasilitas tersebut yang dapat berdampak langsung terhadap terhambatnya kelangsungan penyebaran informasi khususnya informasi yang berasal dari media elektronik.



Gambar 20. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Soppeng, 2020

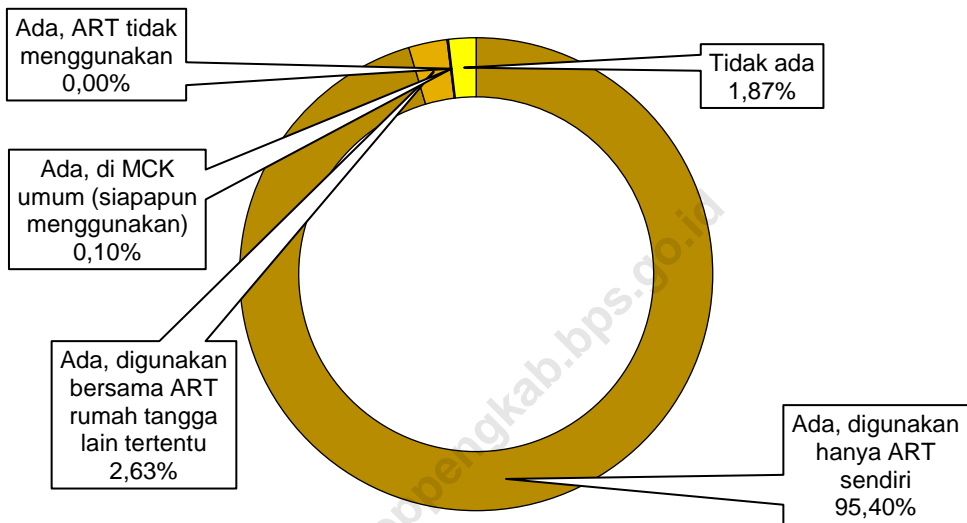
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Gambar 20 memperlihatkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Terdapat 99,29 persen dari total rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 0,08 persen rumah tangga menggunakan listrik Non PLN. Meskipun begitu, masih terdapat rumah tangga yang belum merasakan manfaat dari penggunaan listrik ini, persentasenya sebesar 0,63 persen. Rumah tangga tersebut memanfaatkan pelita/ sentir/ obor sebagai sumber penerangannya karena belum terjangkaunya aliran listrik.

6.3.3. Fasilitas Buang Air Besar

Sistem pembuangan sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan dan risiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah sanitasi lingkungan tidak terlepas dari aspek kepemilikan sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam

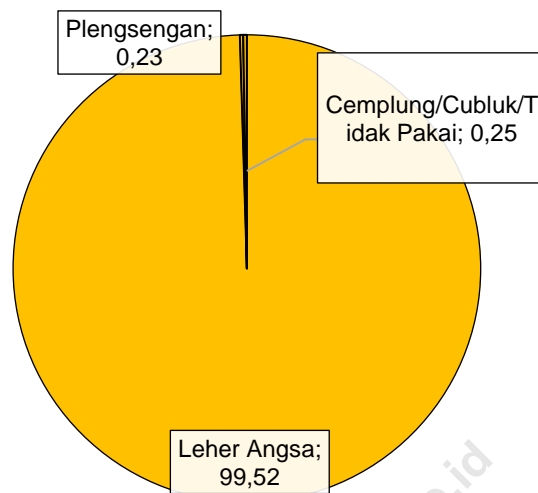
pemeliharaan dan kebersihan sarana tersebut. Fasilitas rumah tangga yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi empat kategori yaitu sendiri, bersama, umum dan tidak ada.



Gambar 21. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Gambar 21 dapat diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Soppeng sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri di rumahnya, persentasenya sebesar 95,40 persen. Meskipun begitu, masih ada rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama, umum, tidak menggunakan fasilitas buang air besar yang tersedia, bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, persentasenya 1,87 persen.

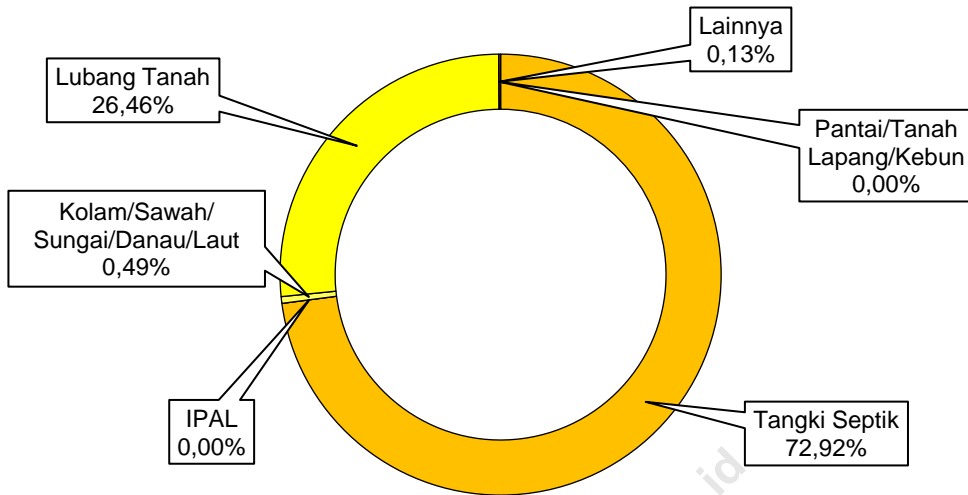


Gambar 22. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Fasilitas buang air besar dianggap memenuhi syarat Kesehatan apabila kloset yang digunakan berjenis leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Berdasarkan Fasilitas buang air besar rumah tangga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sudah menunjukkan kondisi yang baik yakni sebanyak 99,52 persen rumah tangga di Kabupaten Soppeng menggunakan kloset jenis leher angsa. Sementara itu jika dilihat berdasarkan tempat penampungan tinja, jenisnya dapat dibedakan menjadi tangki septik, IPAL, Kolam/ Sawah/ Sungai/Danau/Laut, Lubang Tanah, Pantai/ Tanah Lapangan/Kebun dan Lainnya. Pemanfaatan tempat pembuangan akhir tinja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat di Gambar 23.



Gambar 23. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Tinja yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng, 2020
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan Gambar 23, di Kabupaten Soppeng, sudah banyak rumah tangga yang menggunakan tangki septik, persentasenya mencapai 72,92 persen. Tempat pembuangan tinja terbanyak kedua digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Soppeng adalah lubang tanah, persentasenya mencapai 26,46. Tempat penampungan tinja yang berada di area terbuka dikatakan tidak sehat karena cenderung lebih mudah menimbulkan penyebaran penyakit bagi lingkungan di sekitarnya, khususnya penyakit saluran pencernaan. Mengingat hal tersebut pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada rumah tangga yang tempat pembuangan tinja nya berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut walaupun persentasenya hanya 0,49 persen.

<https://soppengkab.bps.go.id>



BAB 7

LAIN-LAIN

<https://sop.pengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

Bab VII

Lain-Lain

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Data tentang penghasilan/pendapatan penduduk sangat sulit diperoleh, sehingga pendekatan yang sering digunakan oleh BPS dalam survei yaitu pendekatan pengeluaran rumah tangga. Hal tersebut dilakukan karena ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban mengenai pendapatan yang kurang akurat, sebaliknya penduduk cenderung memberikan jawaban yang jujur dan akurat apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi.

Data pengeluaran dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi rumah tangga secara umum melalui indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk karena besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun nonmakanan tersebut secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

7.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Menurut Hukum Engel, apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi nonmakanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah.

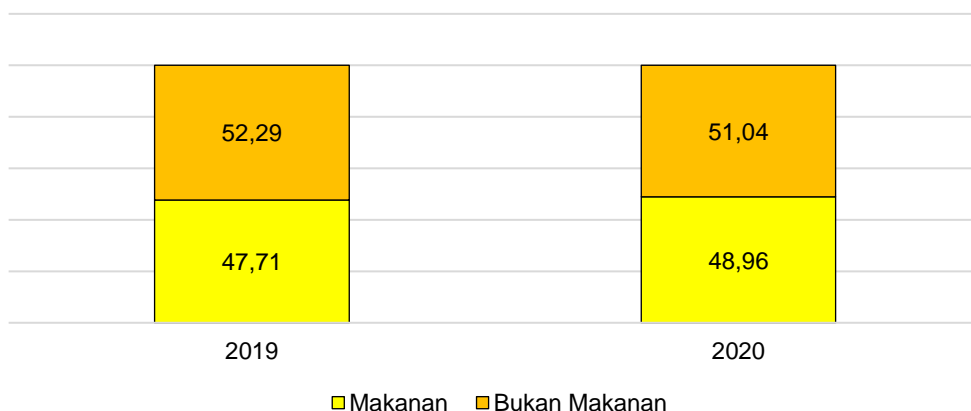
karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019 -2020 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Makanan	402.451	399.650
Bukan Makanan	441.133	416.590
Jumlah	843.584	816.240

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2020

Berdasarkan Tabel 10, diketahui terdapat penurunan pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, rata-rata total pengeluaran per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Soppeng sebesar Rp 816.240 dengan rincian untuk konsumsi makanan sebesar Rp 399.650,00 dan untuk konsumsi non makanan sebesar Rp 416.590,00. Angka tersebut menurun dari tahun 2019 baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan.



Gambar 24. Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2020

Apabila diamati pada gambar 24 di atas, selama rentang waktu 2019-2020, terjadi kenaikan pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan. Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Soppeng untuk konsumsi makanan naik menjadi 48,96 persen daripada tahun 2019 yang mencapai 47,71 persen. Begitu pula sebaliknya, pengeluaran perkapita sebulan konsumsi non makanan turun menjadi 51,04 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

7.2. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

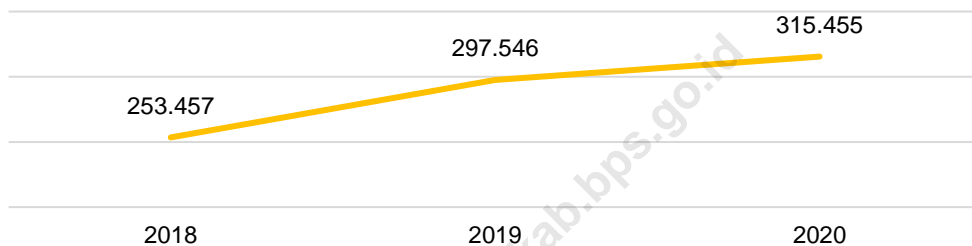
Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pembahasan di sini hanya dibatasi pada kemiskinan absolut yang datanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan (setara 2100 kkal/hari) yang diwakili 52

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan lain-lain), sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

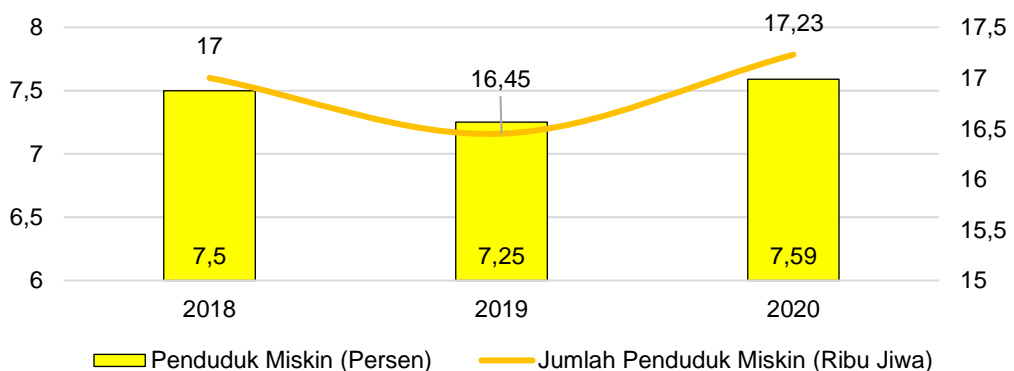
Selama kurun waktu 2018-2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng selalu mengalami kenaikan



Gambar 25. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Pada tahun 2020 nilai Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai Rp. 315.455, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 253.457 dan 2019 sebesar Rp.297.546. Sejalan dengan naiknya Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin pun turun.



Gambar 26. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018-2020

Penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 berjumlah 17 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 16,45 ribu jiwa dan tahun 2020 kembali naik menjadi 17,23 ribu jiwa.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>



LAMPIRAN

bps.kab.bengkab.go.id

<https://soppengkab.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1. Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk (Jiwa)	226.770	226.991	235.167
• Laki-Laki	106.788	106.927	113.243
• Perempuan	119.982	120.064	121.924
Rasio Jenis Kelamin	89	89,06	92,88
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)			
• 2017-2018	0,13		
• 2018-2019		0,1	
• 2019-2020			3,6
Kepadatan Penduduk(Jiwa/Km2)	151,18	151,33	156,78
Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
• 0-14	53.414	52.878	47.238
• 15-64	149.756	150.072	161.744
• 65+	23.600	24.041	26.185
Angka BebanKetergantungan	51,43	51,25	45,39
Jumlah Kecamatan	8	8	8
Jumlah Desa/Kelurahan	70	70	70
Luas Wilayah (Km2)	1.500	1.500	1.500
Status Perkawinan Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas (Persen)			
• Belum Kawin	30,16	28,54	29,48
• Kawin	58,1	57,91	56,92
• Cerai	11,75	13,56	13,6

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2020 Provinsi Sulawesi Selatan, Potret Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Soppeng, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Lampiran 2. Beberapa Indikator Fertilitas dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Partisipasi KB Wanita Umur 15-49 tahun (Persen)			
Pernah Menggunakan	21,12	19,81	22,84
Sedang Menggunakan	40,45	40,56	41,99
Tidak Pernah Menggunakan	38,43	39,63	35,17

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

Lampiran 3. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator Pendidikan	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sekolah			
• SD/Sederajat	272	273	273
• SMP/Sederajat	69	71	71
• SMA/Sederajat	32	37	31
Jumlah Murid			
• SD/Sederajat	22.037	21.384	21.058
• SMP/Sederajat	10.339	10.718	10.761
• SMA/Sederajat	6.987	9.906	10.031
Jumlah Guru			
• SD/Sederajat	2.845	2.952	2.851
• SMP/Sederajat	1.576	1.513	1.278
• SMA/Sederajat	957	1.141	1.177
Rasio Murid Guru			
• SD/Sederajat	7,75	7,24	7,39
• SMP/Sederajat	6,56	7,08	8,42
• SMA/Sederajat	7,3	8,68	8,52
Rasio Murid Sekolah			
• SD/Sederajat	81,02	78,33	77,14
• SMP/Sederajat	149,84	150,96	151,56
• SMA/Sederajat	218,34	267,73	323,58
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas (Persen)			
• Laki-Laki+Perempuan	90,06	91,09	92,1
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)			
• Tidak Punya Ijazah SD	24,16	22,01	20,65
• SD/Sederajat	24,47	27,64	30,6
• SMP/Sederajat	20,27	17,32	16,53
• SMA/Sederajat ke Atas	31,1	33,02	32,22
Angka Partisipasi Sekolah (Persen)			
• 7-12	99,6	99,46	99,35
• 13-15	95,24	95,38	95,03
• 16-18	78,86	77,96	78,22
Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun)	7,63	7,74	7,81

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 Kabupaten Soppeng dalam Angka 2019-2021

Lampiran 4. Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Fasilitas Kesehatan			
• Rumah Sakit Umum	1	1	1
• Puskesmas	17	17	17
• Klinik/Balai Kesehatan	1	1	1
• Posyandu	327	327	328
• Polindes	68	68	72
Jumlah Tenaga Kesehatan			
• Dokter	68	88	82
• Perawat	428	345	287
• Bidan	151	190	143
• Farmasi	18	18	40
• Ahli Gizi	25	42	44
Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	69,02	69,43	69,65
Penolong Persalinan Pertama (Persen)			
• Tenaga Medis	100	98,46	100
• Tenaga Non Medis	0	1,54	0

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Lampiran 5. Beberapa Indikator Perumahan Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Rumah (Persen)			
• Luas Lantai < 50 m2	14,6	13,44	15,05
• Lantai Bukan Tanah	99	99	98,83
Dinding Terluas Rumah (Persen)			
• Dinding Tembok/Kayu	19,71	63,17	64,99
• Dinding BukanTembok/Kayu	80,29	36,83	35,01
Atap Terluas Rumah (Persen)			
• Bukan Ijuk/Daun- Daunan	100	100	99,73
• Ijuk/Daun-Daunan	0	0	0,27
Sumber Air Minum (Persen)			
• Air Bersih	88,84	95,11	92,69
• Bukan Air Bersih	11,16	4,89	7,30
Sumber Penerangan Rumah (Persen)			
• Penerangan Listrik	98,6	98,5	99,37
• Penerangan Bukan Listrik	1,4	1,5	0,63
Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Rumah Tangga (Persen)			
• Menggunakan Kakus	95,33	96,38	98,13
• Tidak Menggunakan Kakus	4,67	3,62	1,87
Penggunaan Jenis Kloset Rumah Tangga (Persen)			
• Leher Angsa/ Plengsengan	97,65	99,53	99,75
• Cubluk/Cemplung/ Tidak Ada	2,35	0,37	0,25
Tempat Pembungan Akhir Tinja (Persen)			
• Tangki/IPAL	70,55	61,71	72,91
• Bukan Tangki/IPAL	29,45	38,29	27,09

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Lampiran 6. Beberapa Indikator Lainnya Kabupaten Soppeng, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah)			
• Makanan	427.053	402.451	399.650
• Bukan Makanan	390.687	441.133	416.590
• Total Pengeluaran	817.740	843.584	816.240
Pola Konsumsi Penduduk (Persen)			
• Makanan	52,22	47,71	48,96
• Non Makanan	47,78	52,29	51,04
Penduduk Miskin (Persen)	7,5	7,25	7,59
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	17	16,45	17,23

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo No. 127, 90812 Watansoppeng Sulawesi Selatan,

Telp (0484) 21060, Faks (0484) 23377, Mailbox : soppengkab@bps.go.id